

STUDI TENTANG FINANCIAL LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN POLITICAL TIE YANG DIMILIKI PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT BANK DI INDONESIA

EKO SUPRIYATNO

ABSTRACT

This study uses bank loan data to examine the effect of the political relationship (political tie) between the company and the government to the assessment of companies financial leverage and profitability in the bank lending decisions in Indonesia. Bank loan data are credit that the public company received from 2005 to

2010, where in 2005 an era of reform after the holding of presidential first elections by the people in 2004. The numbers of samples are 1465 observations. Political tie proxies in this study are determined from (1) the commissioners and directors of companies included as politically exposed person categories according to Bank Indonesia (2) the company is a State-Owned Enterprises (SOEs). Financial leverage and profitability of firms in this study using the indicators of debt-to-tangible net worth and net profit margin in the period prior to obtaining credit. This study uses moderated regression analysis (MRA).

The study found a political tie affect corporate profitability assessment in bank lending decisions. Firms with lower profitability evident receive larger bank loan because they have a political tie (rent-seeking hypothesis). However, this study found a political tie does not affect the assessment of financial leverage in bank's lending decisions. This also supports Faccio (2010), Fisman (2001), and Backman (2001) researches conducted in Indonesia. Indonesia condition which has a weak institutional regulation and high information asymmetry is beneficial for companies that have a political tie. This leads to more trusted political tie as an indicator of the profitability.

Keywords: Political Tie, Financial Leverage, Profitability, Bank Loan, Rent-seeking Hypothesis, Politically Exposed Person, State-Owned Enterprises (SOEs).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asimetri informasi yang berasosiasi dengan transparansi laporan keuangan yang rendah diduga merupakan penyebab utama hampir kolapsnya bank di USA (Bhattacharya, Desai, dan Venkataraman, 2009). Dalam industri perbankan asimetri informasi terjadi antara perusahaan dengan bank. Bank dalam memberikan kredit pada dasarnya mempunyai keterbatasan informasi mengenai perusahaan karena informasi mengenai perusahaan tidak tersedia secara bebas dan terbuka (Wijaya,

2010: 59). Penelitian oleh Leuz dan Oberholzer-Gee (2003) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat *mandatory disclosure* dan *low transparency facilities* yang rendah. Hal ini merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah, karena semakin sedikit informasi akuntansi yang dapat diperoleh mengenai perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai dari suatu hubungan politik bagi perusahaan tersebut. Hal ini dibuktikan dari penelitian Chaney, Faccio, dan Parsley (2010) bahwa kualitas *earnings* yang dilaporkan oleh perusahaan yang

memiliki hubungan politik dengan pemerintah, lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah.

Terdapat beberapa alasan untuk mempercayai bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah (*political tie*) memperoleh keputusan kredit bank yang lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Fisman (2001) dan Faccio (2002) menyatakan bahwa hubungan politik yang kuat menghasilkan *business opportunities* dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah berpotensi lebih besar memperoleh proyek-proyek pemerintah dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Dine (2005), Fishman (2001), Johnson dan Mitton (2003) menyatakan bahwa hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat dilihat sebagai *reputation of profitability* karena perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik atau profit yang tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah, pada kondisi regulasi institusional yang lemah. Hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki *political tie* tidak tergantung pada pinjaman bank.

Pandangan lain menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memiliki kemampuan mengalihkan pinjaman bank bagi mereka, tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan ini memiliki proyek yang menguntungkan atau tidak, dan kemampuan ini disebut „*rent-seeking*’ hypothesis (Zheng dan Zhu, 2009). Penelitian yang mendukung pandangan ini adalah penelitian Chaney, Faccio, dan Parsley (2010), yang menemukan bahwa kualitas *earnings* yang rendah berasosiasi dengan *cost of debt* yang

lebih tinggi hanya pada perusahaan yang tidak memiliki *political tie*. Hal ini didukung dengan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk semester I tahun 2007, sektor perbankan mengakibatkan kerugian negara Rp 2,1 triliun, dan tindak korupsi di industri perbankan dinilai yang paling besar dan paling merugikan negara (www.antikorupsi.org). Bahkan nilai korupsi di sektor perbankan jauh lebih besar dibanding sektor pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 219 miliar. Padahal aturan-aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia sangat ketat, bahkan beberapa pakar perbankan memandang bahwa perbankan nasional *over regulated* (Wijaya, 2010 dan Arafat, 2010), namun karena kurangnya supervisi yang benar, korupsi masih sangat besar di sektor perbankan nasional (Wijaya, 2010: 58).

Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan kredit dibedakan menjadi 2, yaitu: *soft* dan *hard information* (Petersen, 2004) Tingginya tingkat asimetri informasi di Indonesia menyebabkan *hard information* bersaing dengan *soft information* dalam keputusan pemberian kredit bank. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Rivai dan Veithzal (2006: 306), bahwa dalam analisis kredit, analis juga menilai *political power* yang digunakan untuk menopang pemasaran produk perusahaan. Bank pemerintah yang seharusnya menjadi *role model* bagi bank swasta, ternyata banyak digunakan sebagai kendaraan politik pemerintah. Penelitian Laporta *et al* (2002) dan Kane (1977) dalam Wijaya (2010: 64-65), menemukan bahwa bank pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik pemerintah daripada pertimbangan bisnis secara ekonomi. Bahkan penelitian Backam (2001) dari Leuz & Oberholzer-Gee (2003), menyatakan bahwa perusahaan Indonesia yang memiliki hubungan politik dengan rezim mantan

presiden Soeharto memiliki akses pendanaan yang menguntungkan, terutama dari bank pemerintah. Hal ini memberikan indikasi bahwa preferensi kredit lebih banyak terjadi di bank pemerintah dibanding bank swasta.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1). Apakah *non-earnings information* (rasio *financial leverage*), *earnings information* (rasio profitabilitas), dan jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank? (2). Apakah *non-earnings information* (rasio *financial leverage*), *earnings information* (rasio profitabilitas), dan jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi? Adapun penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *financial leverage*, profitabilitas, dan *political tie* yang dimiliki perusahaan, terhadap keputusan pemberian kredit bank di Indonesia. Penelitian ini juga menguji sensitivitas penilaian rasio *financial leverage* atau rasio profitabilitas perusahaan yang memiliki *political tie*. Pada akhirnya, penelitian ini juga menguji apakah preferensi kredit di bank pemerintah lebih besar daripada bank swasta, ataukah preferensi kredit memang hanya terjadi di bank pemerintah.

LANDASAN TEORI

Political Tie

Khwaja dan Mian (2004) melakukan penelitian mengenai *political tie* yang dimiliki perusahaan dan pengaruhnya terhadap keputusan kredit bank di Pakistan yang menguntungkan perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memperoleh kredit dua kali lebih besar dan memiliki potensi *default* 50% lebih besar dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Preferensi tersebut terjadi pada bank pemerintah, namun tidak terjadi pada bank swasta. Kekuatan hubungan politik tersebut

ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki politisi perusahaan dan apakah partainya memegang kekuasaan pemerintahan pada saat kredit diberikan. Hal senada juga muncul dari hasil penelitian Yeh dan Shu (2010) mengenai preferensi kredit bank di Taiwan, bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* dengan partai yang berkuasa, menikmati kredit tanpa jaminan pada masa kekuasaan partai tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa *good governance* menghalangi perusahaan untuk terlibat dalam hubungan politik dan memperoleh preferensi kredit bank.

Penelitian terhadap preferensi kredit bank di Cina oleh Zheng dan Zhu (2009) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memiliki sensitivitas lebih kecil dalam penilaian profitabilitas dan *tangibility* dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Konsekuensinya adalah perusahaan yang memiliki *political tie* lebih tidak efisien dalam melakukan investasi dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Hubungan antara *political tie* dalam kredit dengan efisiensi investasi semakin kuat untuk perusahaan yang dimiliki pemerintah dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

Beberapa penelitian mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memiliki *political tie* di Indonesia antara lain dilakukan oleh:

1. Chaney, Faccio, dan Parsley (2010) menemukan bahwa kualitas *earnings* yang rendah berasosiasi dengan *cost of debt* yang lebih tinggi hanya pada perusahaan yang tidak memiliki *political tie*. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki *political tie* menghadapi lebih sedikit konsekuensi negatif (misal: memperoleh jumlah kredit yang lebih kecil) akibat kualitas pengungkapan yang rendah.
2. Fisman (2001) menemukan

bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan mantan Presiden Soeharto kehilangan lebih banyak *return* pada masa rumor kesehatannya memburuk dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Fisman berpendapat bahwa hubungan politik merupakan faktor utama penentu profitabilitas pada negara-negara di Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadi penyebab krisis di Asia Tenggara tahun 1997.

3. Penelitian Faccio (2010), yang melakukan analisis *cross country* (termasuk Indonesia) mengenai perusahaan yang memiliki *political tie*, menemukan bahwa *leverage* dan *market share* lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Namun kinerjanya lebih buruk dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah.

Analisis Kredit dalam Keputusan Pemberian Kredit Bank

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Dalam menganalisis kredit terdapat pertimbangan kualitatif dan kuantitatif, namun diperbolehkan untuk menggunakan salah satu saja, misal: menilai kondisi ekonomi menggunakan kualitatif karena data tidak tersedia. Menurut Rivai dan Veithzal (2006: 289), terdapat 6 prinsip dalam analisis kredit (6 C's analysis), yaitu: *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint*. *Character* merupakan prinsip utama, bila prinsip ini tidak terpenuhi, maka kredit langsung ditolak (Rivai dan Veithzal, 2006: 293). Aspek-aspek analisis kredit dan perhitungan kredit meliputi: Aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, Aspek teknis, Aspek keuangan, Aspek jaminan, dan Aspek sosial ekonomi dan analisis dampak

lingkungan (Rivai dan Veithzal, 2006: 294),

Perusahaan yang Memiliki Hubungan Politik dengan Pemerintah Sebagai High-risk Client

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, ditetapkan bahwa nasabah (individu atau perusahaan) yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah (*politically exposed person*) tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan terorisme.

"*Politically exposed person* adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewargaan negara Indonesia maupun yang berkewargaan asing."

Nasabah yang tergolong *politically exposed person*, yaitu: (1) presiden, (2) pejabat setingkat menteri, (3) gubernur, (4) direktur perusahaan BUMN, (5) ketua dan eksekutif partai politik, (6) pejabat senior TNI atau polisi, (7) pejabat senior di mahkamah dan jaksa agung, (8) pejabat yang ditunjuk dengan peraturan presiden, (9) Anggota keluarga (istri/suami, orang tua, saudara kandung, anak, menantu, dan cucu) dari pejabat yang telah disebutkan di atas. Selain itu UU No 28 Tahun 1999 mendefinisikan penyelenggara negara sebagai: (1) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, (2) pejabat negara pada lembaga tinggi negara, (3) menteri, (4) gubernur, (5) hakim, dan (6) pejabat

lain yang memiliki fungsi strategis. Peraturan ini baru mulai berlaku sejak bulan Juni 2009, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk tahun 2005 - 2010, sehingga ada kemungkinan analisis kredit masih menggunakan *political tie* dalam keputusan pemberian kredit bank.

Pengaruh *Non-earnings Information* dan *Earnings Information* terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank

Zmijewski dalam Palepu *et al* (2004: 10-14), menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi kebangkrutan untuk satu tahun ke depan adalah *profitabilitas* dan *volatility (earnings information)* dan *financial leverage (non-earnings information)*. Menurut Scott (2009: 403), manajemen laba adalah pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen, atau tindakan yang mempengaruhi *earnings*, untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan tertentu. Tujuan perusahaan melakukan manajemen laba antara lain untuk memperoleh kredit dalam jumlah besar, dengan cara memberikan informasi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik. Hal ini didukung Huyghebaert *et al* (2007) bahwa perusahaan yang baru berdiri cenderung melakukan *income-increasing* saat mengajukan pinjaman bank pertama kali. Menurut Jiambalvo (1996) yang dikutip oleh Richardson (1998) bahwa manajemen laba dapat dihambat dengan mempersempit asimetri informasi (*disclosure*) dan penerapan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) oleh auditor. Hal ini didukung oleh penelitian Bannister dan Wiest (2001) yang menemukan bahwa auditor independen memiliki kemampuan untuk menghambat pilihan manajemen. Becker *et al* (1998) dan Van-Tendeloo dan Vanstraelen (2005) juga menemukan bahwa kualitas audit menghambat manajemen laba. *Mandatory disclosure* yang rendah

(Leuz dan Oberholzer-gee, 2003) dan praktek akuntansi serta auditing di Indonesia yang buruk, tidak mampu menghambat manajemen laba di Indonesia. Menurut hasil observasi Tim Bank Dunia terhadap praktek akuntansi dan auditing di Indonesia (www.bapepam.go.id), ditemukan bahwa profesi audit di Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan publik yang independen untuk mengawasi kualitas pengendalian internal KAP, kualitas *assurance*, serta penyelidikan dan pemberian sanksi disiplin bagi anggota profesi yang melanggar.

Pengaruh *Hard Information* dan *Soft Information* terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank

Menurut Foster (1986: 594), rendahnya kualitas *earnings* menyebabkan analisis kredit mencari sumber informasi lain sebagai kompensasi perbedaan metode akuntansi dan terkandungnya manajemen laba dalam laporan laba rugi perusahaan (*hard information*). Salah satu sumber informasi lain yang dipertimbangkan adalah *soft information*, yaitu hubungan politik dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan. Menurut Rivai dan Veithzal (2006: 306), analisis kredit juga menilai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan, antara lain: *political power* yang digunakan untuk menopang pemasarannya, apakah kebijakan dan strategi pemasaran cukup andal untuk merebut pangsa pasar. Hal ini juga mendukung pendapat Dinc (2005), Fishman (2001), Johnson dan Mitton (2003) menyatakan bahwa hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat dilihat sebagai *reputation of profitability* karena perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah, pada kondisi regulasi institusional yang lemah.

Hasil observasi praktek akuntansi dan audit di Indonesia oleh Tim Bank Dunia pada tahun 2005 (www.bapepam.go.id) menemukan bahwa laporan keuangan *audited* bukan faktor utama bagi perusahaan dalam memperoleh persetujuan kredit bank dan investasi lainnya. Tjondro (2007) juga menemukan bahwa *level of assurance* dan reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank di Indonesia. Hal ini memberikan indikasi bahwa analisis kredit tidak berpersepsi bahwa laporan keuangan *audited* memiliki kualitas *earnings* yang lebih baik dibanding laporan keuangan yang *unaudited*. Analisis kredit lebih mempertimbangkan *soft information*, seperti *political tie*, sebagai sumber informasi profitabilitas perusahaan.

Political Tie Mempengaruhi Penilaian Financial Leverage dan Profitabilitas dalam Keputusan Pemberian Kredit Bank

Informasi mengenai hubungan politik dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan dipertimbangkan oleh analisis kredit sebagai *earnings information* karena rendahnya kualitas *earnings* dalam laporan laba rugi perusahaan. Berdasarkan argumen tersebut, maka hubungan politik dengan pemerintah memperlemah penilaian profitabilitas dalam keputusan pemberian kredit bank. Pandangan kedua menyatakan bahwa hubungan politik dengan pemerintah sering diasumsikan mampu mengalihkan pinjaman bank bagi perusahaan tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan memiliki proyek yang menguntungkan atau tidak, disebut *rent-seeking hypothesis* (Zheng dan Zhu, 2009). Penelitian Chaney, Faccio, dan Parsley (2010) menemukan bahwa kualitas *earnings* yang rendah berasosiasi dengan *cost of debt* yang lebih tinggi hanya pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan

politik. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki hubungan politik menghadapi lebih sedikit konsekuensi negatif akibat kualitas pengungkapan yang rendah. Seharusnya pada perusahaan yang memiliki kualitas pengungkapan yang rendah, maka berpotensi untuk memperoleh jumlah kredit yang lebih rendah, tingkat bunga yang lebih tinggi, serta nilai jaminan yang lebih besar, akibat *loan officer* tidak memiliki banyak informasi mengenai perusahaan, sehingga dapat dikategorikan *high risk*. Namun menurut penelitian Chaney, Faccio, dan Parsley (2010), hal ini tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Berdasarkan argumen tersebut, maka hubungan politik dengan pemerintah dapat memperlemah atau memperkuat penilaian *financial leverage* dalam keputusan pemberian kredit bank.

Political Tie Memiliki Pengaruh Lebih Besar di Bank Pemerintah Dibanding Bank Swasta

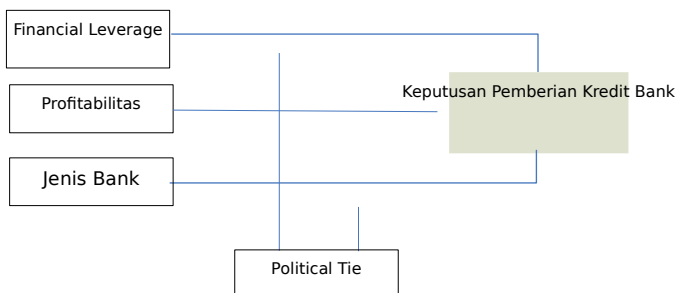
Berdasarkan hasil kajian akademis, bank pemerintah lebih tidak efisien dibanding bank swasta, dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik pemerintah. Misal penelitian Bonin *et al* (2004) menyatakan bahwa bank pemerintah lebih tidak efisien dibanding bank swasta. Hal senada diungkapkan Yeyati *et al* (2004). Laporta *et al* (2002) dan Kane (1977) bahkan menyatakan bahwa bank pemerintah lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik. Berdasarkan penelitian terhadap bank pemerintah di Indonesia, ditemukan bahwa perusahaan Indonesia yang memiliki hubungan politik dengan rezim Soeharto memiliki akses pendanaan yang menguntungkan, terutama dari bank pemerintah (Backman, 2001).

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rerangka Konseptual Penelitian

Asimetri informasi yang buruknya kualitas praktek audit di Indonesia menjadi insentif perusahaan untuk terlibat dalam manajemen laba. Pada kondisi informasi yang tinggi, analis kredit mencoba mencari informasi lain (*soft information*) yang lebih relevan (*Political Tie*) laporan keuangan (*hard information*). *Political tie* sebagai salah satu *soft information* dipertimbangkan oleh analis kredit dalam keputusan pemberian kredit bank terutama di negara yang tingkat transparansinya rendah, seperti Indonesia. Hubungan antar variabel dijelaskan dengan rerangka konseptual pada Gambar 1

Gambar 1: Rerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan empiris di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

- H1: *Non-earnings information* (rasio *financial leverage*) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.**
- H2: *Non-earnings information* (rasio *financial leverage*) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.**
- H3: *Earnings information* (rasio profitabilitas) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.**
- H4: *Earnings information* (rasio profitabilitas) berpengaruh terhadap keputusan**

pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

H5: Jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.

H6: Jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi dari penelitian Sharma, Durand, Gur-Arie (1981) yang dikembangkan dengan menambahkan beberapa variabel independen dan variabel kontrol yang mungkin mempengaruhi jumlah kredit. Penelitian ini menggunakan 3 model analisis,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia, yaitu: laporan keuangan tahunan. Periode yang diteliti adalah periode setelah jatuhnya rezim Soeharto atau era reformasi, karena pada rezim Soeharto perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah terbukti menikmati preferensi kredit bank. Periode yang diteliti adalah tahun 2005 sampai tahun 2010. Tahun 2005 dipilih karena pada tahun itu pemerintahan era reformasi dimulai, dimana presiden pertama kalinya dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004.

Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 423 perusahaan *go public* yang diambil dari www.idx.co.id. Dalam menentukan jumlah sampel terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

- Perusahaan bukanlah lembaga keuangan atau

pembiayaan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah keputusan pemberian kredit bank bagi perusahaan (perusahaan), sehingga lembaga keuangan dan pembiayaan tidak relevan dengan topik ini.

- b. Perusahaan memiliki minimal 3 tahun data laporan keuangan yang dipublikasikan. Hal ini dikarenakan perbandingan rasio untuk beberapa tahun, misal: 3 tahun, akan menunjukkan angka rasio yang

Variabel Dependen			
Variabel	Deskripsi	Proksi	Skala
Keputusan pemberian kredit bank	Jumlah kredit baru yang diberikan oleh bank pada periode t.	\ln Pagu maksimal utang bank _t	Rasio

lebih berarti dibanding angka rasio 1 tahun saja (Rivai dan Veithzal, 2006: 349).

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah target populasi yang diperoleh adalah 309 perusahaan, dan semua perusahaan diambil sebagai sample. Dari 309 perusahaan, diperoleh 1813 pemberian kredit bank. Sebanyak 142 pemberian kredit diberikan oleh bank asing di luar negeri, sedangkan sebanyak 35 pemberian kredit merupakan pinjaman sindikasi. Keduanya tidak relevan dalam penelitian ini. Selain itu *debt-to-tangible net worth (DTN)* yang negatif juga dikeluarkan dari sampel karena perusahaan dengan ekuitas negatif dianggap dalam tahap restrukturisasi utang. Sehingga pemberian kredit yang memenuhi syarat untuk diuji sebesar 1465 observasi. Tabel 1 berikut ini menjelaskan rincian sampel perusahaan dan jumlah observasi yang diuji dalam penelitian ini:

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable dapat dilihat di table 2.

Data kredit bank diperoleh dari laporan keuangan *audited* yaitu *notes to financial statement* bagian utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel Kontrol

Variabel Kontrol			
Variabel	Deskripsi	Proksi	Skala
Tangibilitas	Perbandingan aktiva tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan	$Tangibilitas = \frac{Net\ fixed\ assets}{total\ aset}$	Rasio
Ukuran perusahaan	Total kekayaan yang dimiliki perusahaan pada periode t-1	\ln total aset pada periode t-1	Rasio
Ukuran bank	Total kekayaan yang dimiliki bank pada periode t	\ln total aset bank pada periode t	Rasio
Relation lending	Prefrensi kredit yang diperoleh perusahaan karena <i>history</i> kredit pada periode sebelumnya sangat baik	<i>Dummy variabel</i> , 1 = perusahaan pernah memperoleh kredit dari bank yang sama pada periode t-1; 0 = tidak pernah	Nominal
Tahun	Tahun dimana kredit diberikan	<i>Dummy variabel</i> , 1 = Tahun krisis; 0 = Tahun non-krisis	Nominal
Industry	Jenis industri yang memperoleh kredit	<i>Dummy variabel</i> , 1= Agriculture, 2= Mining, 3= Basic, 4= Miscellaneous, 5= Consumer goods, 6= Property, 7= Infrastructure, 8= Trade&services	Nominal

Sumber: Olahan (2011)

Teknik Analisis Data

Berikut ini adalah tahap-tahap pengolahan data:

- 1) Menyeleksi semua perusahaan go publik dari daftar *company profile* IDX 2010.
- 2) Melakukan rekap data utang bank, rasio DTN, rasio NPM, jenis bank, rasio tangibilitas, ukuran perusahaan, ukuran bank, *relation lending*, tahun pemberian kredit, dan jenis industri perusahaan yang memperoleh kredit.
- 3) Mengumpulkan data mengenai biografi dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan yang menjadi sampel dan menentukan perusahaan yang memiliki *political tie*.
- 4) Melakukan uji asumsi klasik dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk menentukan *political tie* sebagai *pure moderator* atau *quasi moderator variable*.

5) Melakukan analisis hasil pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dengan kriteria pengujian:

- 1) Jika nilai signifikansi < 0.05, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, begitu juga sebaliknya.
- 2) Jika koefisien β *political_tie**NPM signifikan negatif, maka hubungan politik dengan pemerintah memperlemah penilaian profitabilitas dalam keputusan pemberian kredit bank (*'rent-seeking' hypothesis*). Jika koefisien β *political_tie**NPM signifikan positif, maka hubungan politik dengan pemerintah memperkuat penilaian *financial leverage* dalam keputusan pemberian kredit bank (*reputation of profitability*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Deskripsi Umum Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 309 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Tabel 4 dan Tabel 5 berikut menyajikan gambaran umum data (observasi) yang diuji dalam penelitian berdasarkan tahun dan jenis industri. Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 jumlah observasi yang paling banyak diuji dalam penelitian adalah tahun 2008 dan jenis industri yang paling banyak menerima pemberian kredit adalah perusahaan dagang dan jasa.

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata utang

Descriptive Statistics					
	N	Mini	Maximu	Mean	Std. Devi
UTAN	1,	70,5	9,058,87	52,619,	1,78*
G	46	60,0	2,100,00	366,29	9
BANK	5	00	1	2	23.0
DTN	1,	0.00	322.27	4.32	2
NPM	46				
	5	-	2.04	0.07	0.46
TANGI		10.2			
BILITA	1	9			*

bank yang diberikan adalah Rp 52,6 miliar dengan jumlah minimum sebesar Rp70,6 juta dan maksimum sebesar Rp9,06 triliun. Rata-rata DTN perusahaan yang diteliti sebesar 4.32 dengan jumlah minimum dan maximum sebesar 0.00 dan 322.27. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang diteliti rata-rata memiliki jumlah utang 4 kali lebih besar dibanding modalnya. Dari sisi NPM, rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki rasio 7% dari total penjualan. Ukuran perusahaan yang diteliti mulai dari yang memiliki total aset Rp 9,1 miliar sampai dengan total aset mencapai Rp97,56 triliun, dengan rata-rata total aset Rp 1,4 triliun. Ukuran bank yang diteliti mulai total aset Rp 413 miliar) sampai dengan total aset Rp 408 triliun, dengan rata-rata ukuran bank Rp 48,7 triliun.

5.3 Moderated Regression Analysis (MRA)

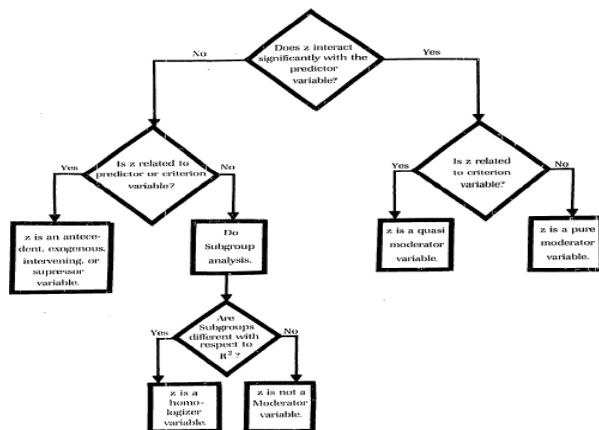
Moderated Regression Analysis (MRA) dimulai dengan menentukan apakah *political tie* merupakan variabel moderator, *pure moderator* atau *quasi moderator*. Menurut Sharma, Durand, dan Gur-Arie (1981), kriteria penentuan adalah (lihat gambar 2):

- a. Jika model ke-2 dan model ke-3 berbeda signifikan, dan *political tie* berinteraksi signifikan dengan *predictor variable*, maka *political tie* adalah variabel moderator.
- b. Jika model ke-1 dan model ke-2 tidak berbeda signifikan, tetapi keduanya berbeda dengan model ke-3, dan *political tie* tidak berinteraksi signifikan dengan

dengan *criterion variable*, maka *political tie* adalah *pure moderator variable*.

- c. Jika model

ke-1, model ke-2, dan model ke-3 berbeda satu dengan lainnya, dan *political tie* berinteraksi signifikan dengan *criterion variable*, maka *political tie* adalah *quasi moderator variable*.



Sumber: Sharma, Durand, Gur-Arie (1981)

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah sebagai berikut:

1. Uji asumsi klasik: Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, ketiga model regresi memenuhi uji asumsi normalitas dan heterokedastisitas.
2. Dari hasil pengujian regresi model ke-1, 2, dan 3, diperoleh bahwa *political tie* adalah *pure moderator variable*.
3. *Model Summary* pada Model ke-3: R square menunjukkan angka 0.288. Hal ini berarti sebesar 28,8% keputusan pemberian kredit bank dapat dijelaskan oleh *debt to tangible-net-worth (DTN)*, net profit margin (NPM), jenis bank, tangibilitas, ukuran perusahaan, ukuran bank, *relation lending*, tahun, jenis industri, P*DTN, P*NPM, P*jenis bank, P*tangibilitas, P*ukuran perusahaan, P*ukuran bank, P**relation lending*, P*tahun, P*jenis industri, sedangkan sisanya 71,2% dijelaskan oleh variable lain.
4. Anova pada Model ke-3: Dari uji

ANOVA, didapat F hitung adalah 18.690 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pemberian kredit bank.

5. Koefisien Regresi pada Model ke-3: Berdasarkan tabel *coefficients*, P*NPM, P*Industri_3, P*Industri_7, berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit bank. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel-variabel tersebut kurang dari 0.05.

Analisis Hasil Pengujian

1. Pengaruh *Non-earnings Information (Rasio Financial Leverage)* terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan *non-earnings information* (rasio *financial leverage*) tidak berpengaruh terhadap utang bank, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.225) > 0.05. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Zmijewski, yang diambil dari Palepu et al (2004: 10-14), yang menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi *financial distress* untuk satu tahun kedepan adalah *financial leverage* dan profitabilitas. Alasan yang mungkin adalah: Bankir memiliki pandangan yang berbeda mengenai *financial leverage* suatu perusahaan yaitu sudut pandang cost of capital dan *business cycle* (Estenson, 1996).

2. Pengaruh *Non-earnings Information (Rasio Financial Leverage)* terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*DTN juga tidak berpengaruh terhadap utang bank hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.482) > 0.05. Alasan yang mungkin

adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian *financial leverage*. Rivai dan Veithzal (2006: 306) menjelaskan bahwa analisis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan (*reputation of profitability*). Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian *financial leverage*.

3. Pengaruh *Earnings Information* (Rasio Profitabilitas) terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank

Hasil pengujian menunjukkan rasio profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif terhadap utang bank, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 0.06 (signifikan pada 10%). Alasan yang mungkin adalah pengajuan jumlah kredit bank tergantung dari *demand* perusahaan (debitur). Pada perusahaan dengan *net profit margin* tinggi, perusahaan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal, yaitu: *retained earnings*. Selain itu perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendanaan dari penerbitan saham dan obligasi. Logikanya semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah ketergantungan perusahaan pada utang bank. Beberapa penelitian yang mendukung antara lain: (a). Penelitian ICRA Indonesia (2011) yang menyatakan bahwa pada tahun non-krisis pasar utang dan ekuitas sama-sama menguntungkan, sehingga perusahaan memiliki opsi lain untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, dengan kata lain perusahaan mengurangi *demand* terhadap permintaan kredit bank. Hal ini dapat dilihat dari data saham IPO dan *right issue* di tahun 2009 (Rp 13 triliun) dan 2010 (Rp 73,5 triliun), sedangkan penerbitan obligasi perusahaan di tahun 2009 (Rp 27,2 triliun) dan 2010 (Rp36,6 triliun); (b). Penelitian Prastowo dan Chawwa (2009) menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang melakukan IPO, *right issue*, dan menerbitkan obligasi

ternyata berbeda.

4. Pengaruh *Earnings Information* (Rasio Profitabilitas) terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*NPM juga berpengaruh negatif terhadap utang bank, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 0.007 (signifikan pada 1%). Pada hasil pengujian interaksi (P*NPM) menunjukkan pengaruh negatif yang lebih kuat dibanding pengujian secara independen. Hal ini dapat dilihat pada angka beta (absolut) pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Pengujian Regresi NPM terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank secara Independen dan Interaksi

Sumber: olahan (2011)

Berdasarkan Tabel 7 nilai beta (absolut) P*NPM (0.087) > beta (0.045), artinya perusahaan dengan NPM rendah memperoleh kredit bank yang lebih besar apabila memiliki *political tie*. Hal ini berarti *rent-seeking hypothesis* (Zheng dan Zhu, 2009) terbukti. Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh rasio profitabilitas terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Hasil menunjukkan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh profitabilitas terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain perusahaan dengan profitabilitas yang rendah dan memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih besar. Penyebabnya adalah kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah, merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*. Kondisi asimetri informasi yang tinggi turut meningkatkan nilai dari *political tie* yang dimiliki perusahaan. Hasil ini didukung oleh

penelitian Faccio (2010) yang melakukan analisis *cross-country*, termasuk Indonesia, menemukan bahwa *leverage* dan *market share* lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki *political tie*. Ternyata kondisi seperti pada rezim Soeharto (Fisman, 2001 dan Backman, 2001) belum berubah sepenuhnya pada jaman reformasi seperti sekarang ini.

5. Pengaruh Jenis Bank terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan jenis bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.154) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah bank pemerintah menunjukkan kinerja yang makin baik dan efisien. Selain itu bank pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya 3 bank pemerintah (Mandiri, BRI, dan BNI) dalam 2000 peringkat perusahaan terbesar dan terbaik versi Forbes Global di tahun 2011 (10 peringkat perusahaan terbesar di Indonesia).

6. Pengaruh Jenis Bank terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*jenis bank berpengaruh negatif terhadap kredit bank, artinya *political tie* yang dimiliki perusahaan pengaruhnya lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.081) signifikan pada 10%. Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit,

maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Tahap pengujian *partial derivative* adalah:

Tabel 8 Regresi Interaksi Jenis Bank dan *Political Tie*

Sumber: Olahan (2012)

Table 8 menunjukkan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah. Alasan yang mungkin adalah: (a). Bank pemerintah lebih efisien dan lebih berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit dibanding bank swasta. Hal ini didukung dengan masuknya 3 bank pemerintah (Mandiri, BRI, dan BNI) dalam 2000 peringkat perusahaan terbesar dan terbaik versi Forbes Global di tahun 2011 (10 peringkat perusahaan terbesar di Indonesia); (b). Menurut Latif Adam (2012), pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), porsi nasabah yang memiliki tabungan lebih dari Rp 2 milyar hanya 7% dari total nasabah bank, dan menguasai tabungan di perbankan sekitar 45%. Nasabah ini sering "memeras" bank swasta untuk memberikan bunga yang tinggi (di atas tingkat bunga yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan). Sebaliknya bank pemerintah cenderung lebih kebal terhadap "pemerasan" ini karena sumber dana diperoleh dari tabungan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ditunjuknya Bank BNI sebagai bank operasional 1 oleh kementerian keuangan dalam penyaluran dana-dana APBN (Megasari, 2011). Selain itu jumlah bank swasta jauh lebih banyak dibanding bank pemerintah, sehingga persaingan antar bank swasta juga menjadi lebih tinggi.

7. Pengaruh Tangibilitas terhadap

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	13.406	1.458	-0.361	-	0.365
POLITICA	-	0.15	0.05	0.907	0.154
LTIE	1.322	0.228	-0.068	1.42	0.154

Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan tangibilitas tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.506) > 0.05. Beberapa alasan yang mungkin adalah: (a). Jaminan utama untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga persediaan dan piutang dagang (Rivai dan Veithzal, 2006: 391); (b). Penilaian aset untuk jaminan kredit umumnya dilakukan oleh *appraisal* dengan menggunakan *fair value*. PSAK 16 yang wajib diterapkan sejak tahun 2008 memberikan pilihan bagi perusahaan *go public* untuk menerapkan *cost* atau *fair value*. Hal ini menyebabkan angka *net fixed asset* di neraca untuk setiap perusahaan memiliki dasar yang berbeda.

8. Pengaruh Tangibilitas terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*tangibilitas tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.119) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah tangibilitas merupakan rasio aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saat ini dibandingkan total seluruh aktiva, sedangkan analisis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal, 2006: 306), sehingga sifatnya lebih pada penilaian prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang, tidak pada kondisi perusahaan saat ini. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian tangibilitas perusahaan.

9. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.000) < 0.05. Alasan yang mungkin adalah ukuran perusahaan lebih sering digunakan sebagai proksi ukuran jaminan yang dimiliki perusahaan (Hamada, 2008). Rivai dan Veithzal (2006: 380), menyatakan bahwa jaminan perbankan merupakan suatu upaya untuk memperoleh pelunasan kredit yang diberikan kepada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar asset perusahaan yang dapat dijadikan jaminan untuk utang bank, sehingga resiko terjadinya gagal bayar juga lebih kecil.

10. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.261) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah bank melihat ukuran perusahaan sebagai nilai **jaminan yang dapat disediakan perusahaan saat ini** dalam pengajuan kredit. Rivai dan Veithzal (2006: 380), mengatakan umumnya bank mempunyai patokan bahwa nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang disetujui. Apabila dikemudian hari terjadi gagal bayar, maka pihak bank dapat menjual jaminan tersebut. Di sisi lain analisis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal, 2006: 306), sehingga sifatnya lebih pada **prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang**.

11. Pengaruh Ukuran Bank terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan ukuran bank berpengaruh positif terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.000) < 0.05. Menurut De Haas, Ferreira, dan

Taci (2009), ukuran bank mempengaruhi jumlah kredit. Bank besar memperoleh keuntungan lebih dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan besar, karena keuntungan yang mereka peroleh melebihi biaya memproses informasi calon debitur (*economic scale*). Selain itu bank kecil terkendala aturan perbankan yang membatasi jumlah kredit kepada calon debitur, sehingga mereka lebih fokus pada perusahaan kecil dan menengah. Di Indonesia diatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang bertujuan agar pemberian kredit tidak terpusat pada peminjam atau kelompok tertentu (Rivai dan Veithzal, 2006: 281). Menurut Peraturan Bank Indonesia no 7/3/PBI/2005 pasal 11 menyatakan bahwa BMPK ditetapkan sebesar 20% - 25% dari modal bank.

12. Pengaruh Ukuran Bank terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.261) > 0.05. *Political tie* tidak mempengaruhi penilaian analis kredit terhadap ukuran bank, karena ketentuan BMPK merupakan suatu regulasi yang harus dipenuhi, apabila bank tidak ingin dikenakan sanksi dari Bank Indonesia. Batas BMPK adalah 20%-25% dari modal bank saat memberikan kredit (**kondisi saat ini**). Di sisi lain analis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal, 2006: 306), sehingga sifatnya lebih pada **prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang**.

13. Pengaruh *Relation Lending* terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan

relation lending tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.907) > 0.05. Hal ini bertentangan dengan penelitian Hamada (2008) di Indonesia, bahwa bank lebih mengandalkan *relation lending* dalam memberikan kredit kepada perusahaan kecil dan menengah. Alasan yang mungkin adalah sebagai berikut: (a). Dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan besar (*go public*), bank tidak mengandalkan pada *relation lending* karena asimetri informasi pada perusahaan *go public* tidak sebesar pada perusahaan kecil dan menengah; (b). Bank mulai mengurangi penggunaan teknik *relation lending* dalam keputusan kredit. Hal ini sesuai dengan penelitian Hamada dan Konishi (2010) di Indonesia, yang menemukan bahwa setelah restrukturisasi perbankan, *related lending* berkurang.

14. Pengaruh *Relation Lending* terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P**relation lending* juga tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.489) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian *relation lending*. Rivai dan Veithzal (2006: 306) menjelaskan bahwa analis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian *relation lending*.

15. Pengaruh Tahun terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan tahun tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.769) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah karena pemberian kredit tergantung dari *demand* perusahaan. Justru pada tahun

krisis (2006 dan 2008) rasio *undisbursed loan* terhadap total kredit lebih kecil dibanding tahun non-krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun krisis perusahaan lebih banyak mengajukan kredit bank dibanding tahun non-krisis.

16. Pengaruh Tahun terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P^* tahun juga tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.963) > 0.05$. Alasan yang mungkin adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian tahun pemberian kredit. Rivai dan Veithzal (2006: 306) menjelaskan bahwa analisis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian tahun pemberian kredit.

17. Pengaruh Industri terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Hasil pengujian menunjukkan jenis industri: *basic*, *miscellaneous*, *consumer goods*, dan *infrastructure industry* berpengaruh positif terhadap utang bank, artinya keempat industri ini memperoleh kredit bank yang lebih besar dibanding industri lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas industri tersebut < 0.05 . Alasan yang mungkin adalah keempat industri tersebut memiliki siklus bisnis yang cenderung stabil dengan laba yang juga relatif stabil tiap tahunnya.

18. Pengaruh Industri terhadap Keputusan Pemberian Kredit dengan *Political Tie* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan P^* *basic industry* dan P^* *infrastructure industry* berpengaruh negatif terhadap kredit bank (signifikan pada 5% dan 1%), sedangkan P^* *mining industry* berpengaruh positif terhadap kredit

bank (signifikan pada 10%). Hal ini berarti *basic* dan *infrastructure industry* memperoleh kredit yang lebih kecil apabila perusahaan tersebut memiliki *political tie*, sedangkan *mining industry* memperoleh kredit yang lebih besar apabila perusahaan memiliki *political tie*.

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *basic industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*.

Adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *basic industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih rendah. Bila dilihat dari data penelitian, *basic industry* yang memiliki *political tie* dan menerima kredit dari bank adalah PT Tjiwi Kimia (kertas), PT Semen Gresik (semen), PT Sorini Agro Asia (kimia), PT Arwana Citramulia (keramik), dan PT Unggul Indah Cahaya (kimia). Perusahaan-perusahaan ini tergolong perusahaan besar dan *profitable* di pasarnya, sehingga ada kemungkinan *demand* perusahaan terhadap kredit bank lebih kecil. Jadi bukan karena industri ini dianggap lebih berisiko oleh perbankan.

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *infrastructure industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*.

Tabel 10 Regresi Interaksi *Infrastructure Industry* dan *Political Tie*

Model	Unstandar dized		Stand ardize		
INDUST	0.73	0.241	0.13	3.0	0.00
P*Indust	-	0.356	-0.135	-	0.00
POLITIC	-	1.458	-0.361	-	0.3

Sumber: Olahan (2012)

Adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh *infrastructure industry* terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *infrastructure industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih rendah karena sebagian besar perusahaan infrastruktur adalah perusahaan BUMN (Nahadi dan Sunarsip, 2006), sehingga peminjaman sebagian besar didanai bank pemerintah. Akibatnya kredit yang diberikan bank swasta cenderung lebih kecil apabila perusahaan tersebut memiliki *political tie*. Selain itu risiko bisnis infrastruktur yang tinggi, misal: panjangnya jangka waktu proyek, masalah pembebasan lahan, dan potensi munculnya dampak sosial, menyebabkan bank swasta cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit (Nahadi dan Sunarsip, 2006).

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *mining industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*.

Tabel 11 Regresi Interaksi Mining Industry dan Political Tie

Model	Unstandar dized		Standar dized	t	Sig
	Coefficient	Coeffici	Beta		
(Constant)	13.406				
POLITICALTIE	-	1.458	-0.361	-	0.365
INDUSTRY	1.322	0.232	-0.1	0.907	0.767
INDUSTRY	-	0.370	0.058	-	0.29

Sumber: Olan (2012)

Berdasarkan table 11 dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (positif) pengaruh *mining industry* terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *mining industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih tinggi. Alasan yang mungkin adalah industri *mining* terkait erat dengan politik. Marwan Batubara (www.republika.co.id), seorang pengamat energi, menyatakan bahwa ijin usaha pertambangan di kabupaten meningkat setiap kali terjadi pemilihan kepala daerah. Hal ini juga terjadi di tingkat provinsi. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar industri *mining* yang *exist* dan *profitable* memiliki *political tie*, sehingga mereka memperoleh kredit dalam jumlah yang lebih besar.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

- 1) Data kredit bank yang diteliti hanya perusahaan go publik, tidak termasuk perusahaan menengah dan kecil, sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keputusan pemberian kredit bank umum di Indonesia.
- 2) Data kredit bank yang diteliti tidak secara langsung diperoleh dari bank, tetapi dari sumber lain, yaitu: laporan keuangan *audited*. Hal ini menyebabkan keakuratan data menjadi lebih rendah karena data diperoleh dari pihak ketiga.
- 3) Beberapa laporan keuangan *audited* tidak mencantumkan jangka waktu kredit bank, sehingga tahun perolehan kredit bank didasarkan pada penandatanganan akta notaris yang tercantum di laporan keuangan *audited*. Ada kemungkinan terjadi selisih

waktu antara penandatanganan akta dan pencairan kredit.

- 4) Model regresi tidak memenuhi *robustness test*, sehingga ada kemungkinan terjadi bias pada hasil penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Earning information* (rasio profitabilitas) berpengaruh negatif terhadap keputusan pemberian kredit, sedangkan *non-earnings information* (rasio *financial leverage*) tidak berpengaruh terhadap kredit bank. Penjelasan adalah perusahaan yang mengajukan pinjaman bank dalam jumlah besar adalah perusahaan yang "sakit" atau memiliki profitabilitas yang rendah, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi memperoleh pendanaan dari *retained earnings*, pasar saham, dan pasar obligasi, sehingga ketergantungan pada kredit bank lebih rendah. Rasio *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap kredit bank karena *financial leverage* tidak dapat dianalisis secara independen tanpa memperhatikan rasio *Return-on-asset* (ROA). Selama *financial leverage* mengalami peningkatan, tetapi masih dalam batas wajar, dan ROA juga menunjukkan peningkatan, maka rasio ROE juga meningkat. Hal ini tentu berbeda apabila peningkatan *financial*

- leverage* tidak diikuti peningkatan ROA. Selain itu analisis siklus bisnis juga turut mempengaruhi penilaian rasio *financial leverage* oleh analis kredit.
2. Perusahaan “sakit” (rasio profitabilitas rendah) yang memiliki *political tie* ternyata lebih diuntungkan, karena mereka memperoleh kredit yang lebih besar dibanding perusahaan “sakit” yang tidak memiliki *political tie* (*rent-seeking hypothesis*). Penyebabnya adalah kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah, merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*. Kondisi asimetri informasi yang tinggi turut meningkatkan nilai dari *political tie* yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan jenis bank tidak mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan, artinya bank pemerintah saat ini lebih efisien dan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal ini terbukti dari masuknya Bank Mandiri, BRI, dan BNI dalam 2000 perusahaan terbaik di dunia versi Forbes Global 2000 pada tahun 2011 (10 perusahaan terbesar di Indonesia).
 3. Penelitian ini menemukan bahwa *political tie* yang dimiliki perusahaan pengaruhnya lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah. Ada beberapa alasan yang mungkin yaitu:
 - a. Bank pemerintah lebih efisien dan lebih berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit dibanding bank swasta.
 - b. Karakteristik perbankan Indonesia yang cenderung oligopolistik menyebabkan nasabah “kakap” sering memeras bank swasta untuk memberikan bunga yang tinggi. Sebaliknya bank pemerintah cenderung lebih kebal terhadap “pemerasan” ini karena sumber dana bank diperoleh dari tabungan pemerintah. Selain itu jumlah bank swasta jauh lebih banyak dibanding bank pemerintah, sehingga persaingan antar bank swasta juga menjadi lebih tinggi.
 4. Penelitian ini menemukan *basic* dan *infrastructure industry* yang memiliki *political tie* berpengaruh negatif terhadap kredit bank, sedangkan *mining industry* yang memiliki *political tie* berpengaruh positif terhadap kredit bank.
 5. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang pengaruhnya paling kuat dalam keputusan pemberian kredit bank. Hal ini dilihat dari nilai beta variabel ini paling tinggi. Hal ini berarti dalam menentukan jumlah kredit, bank lebih mengutamakan nilai jaminan yang mampu disediakan perusahaan,

karena apabila perusahaan mengalami gagal bayar, maka bank dapat menjual jaminan tersebut sebagai ganti pelunasan.

Saran

- 1) Perusahaan yang diteliti tidak hanya terbatas pada perusahaan go publik, tetapi termasuk juga perusahaan menengah dan kecil, sehingga kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan mengenai analisis kredit bank umum di Indonesia.
- 2) Data kredit bank, seperti: paku kredit, jangka waktu kredit, dan jaminan, sebaiknya diperoleh dari bank yang bersangkutan atau Bank Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian.
- 3) Menambah jumlah data yang diteliti, agar model regresi memenuhi *robustness test*. Dalam memenuhi model yang *robust*, tidak disarankan untuk membuang outlier karena hal itu bertentangan dengan tujuan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2011. Dari 2000 Perusahaan Terbesar Dunia 2010, 10 Asal Indonesia. www.sekolnet.com diakses tanggal 3 Januari 2012.
- , 2008. *Siapakah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara?*. <http://idtpk.wordpress.com> diakses tanggal 10 April 2010.
- , 2007. Korupsi Perbankan Paling Besar. www.antikorupsi.org diakses tanggal 11 Desember tahun 2010.
- Arafat, W. 2010. Kepatuhan Perbankan yang Sejati. www.gctech-institute.com diakses tanggal 10 Pebruari 2010.
- Bank Indonesia. 2010. Regulation of Bank Indonesia No 12/3/PBI Concerning The Application of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program For Non-Bank Foreign Exchange Traders. www.bi.go.id diakses tanggal 18 April 2011.
- , 2009. Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. www.bi.go.id diakses tanggal 18 April 2011.
- , 2005. Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. www.bi.go.id diakses tanggal 18 April 2011.
- Bannister, J.W. 2001. Earnings Management and Auditor Conservatism: Effects of SEC Enforcement Actions. www.emeraldinsight.com diakses tanggal 15 Maret tahun 2011.
- Becker, C. 1998, The Effect of Audit Quality on Earnings Management. *Contemporary Accounting Research, Spring*.
- Bhattacharya, N., Desai, H., dan Venkataraman, K. 2009. Earnings Quality and Information Asymmetry. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 3 Juli 2010.
- Bodie, Z., A.Kane, and A.J.Marcus. 2009. *Investments (Eighth Ed)*. New York: McGraw-Hill.
- Boubakri, N., et al. 2009. Political Connections and The Cost of Equity Capital. www.citeseerx.ist.psu.edu diakses tanggal 14 Januari 2011.
- Chaney, P.K., M Faccio., and D Parsley. 2010. The Quality of Accounting Information in

- Politically Connected Firms. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Dinc, S. 2005. Politicians and Banks: Political Influences on Government-owned Banks in Emerging Markets. *Journal of Financial Economics*. No. 77: 453-479.
- East Asia and Pacific Region of The World Bank. 2005. *Report on The Observance of Standards and Codes (ROSC) Republic of Indonesia: Accounting and Auditing* www.bapepam.go.id diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Estenson, L. 1996. How a Banker Looks at Financial Leverage. www.uwcc.wisc.edu diakses tanggal 3 Januari 2012.
- Faccio, M. 2010. Differences Between Politically Connected and Non-Connected Firms: A Cross Country Analysis. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- . 2002. Politically Connected Firms. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Fisman, R. 2001. Estimating The Value of Political Connections. www2.gsb.columbia.edu diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Foster, G. 1986. *Financial Statement Analysis (Second Ed)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hamada. 2008. Bank Borrowing and Financing of Medium-sized Firms in Indonesia. www.ir.ide.go.jp diakses tanggal 2 Maret 2011.
- Hamada, M., and M.Konishi. 2010. Related Lending and Bank Performance: Evidence from Indonesia. www.ide.go.jp diakses tanggal 18 Januari 2011.
- Huyghebaert, N., H V Bauwhede., dan M Willekens. 2007. Bank Financing as an Incentive for Earnings Management in Business Start-ups. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 15 Maret tahun 2011.
- Johnson, S., dan T Mitton. 2003. Cronyism and Capital Control: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics* No. 67: 351-382.
- Khwaja, A.I., dan A Mian. 2004. Do Lenders Favor Politically Connected Firms? www.ssrn.com diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Koconegoro, H. 2011. Bank Loans: Performance in 2010, Expectation for 2011, and Impact on Credit Quality of Banking Sector. www.icraindonesia.com diakses tanggal 24 Desember 2011.
- Laporta, R., F Lopez-de-Silanes., dan A Shleifer. 2002. Government Ownership of Banks. *Journal of Finance* No. 57: 256-301.
- Leuz, C., dan F Oberholzer-gee. 2003. Political Relationship, Global Financing and Corporate Transparency. www.fic.wharton.upenn.edu diakses tanggal 2 Juli tahun 2010.
- Megasari, D. 2011. BNI Kelola Dana APBN Dinas Perhubungan Sejumlah Provinsi. <http://keuangan.kontan.co.id> diakses tanggal 15 Februari 2012.
- Nahadi, B., dan Sunarsip. 2006. Keterlibatan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur. www.iei.or.id diakses tanggal 5 Januari 2012.
- Palepu, Krishna G., P. Healy., dan V. Bernard. 2004. *Business Analysis & Valuation: Using Financial Statements, 3th edition*. Ohio: Thomson.
- Petersen, Mitchell A. 2004. Information: Hard and Soft. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Prastowo, N.J., dan T.Chawwa. 2009. Kondisi Pasar Keuangan dan

- Implikasinya terhadap Animo Penerbitan Saham dan Obligasi Korporasi. www.bi.go.id diakses tanggal 23 Desember 2011.
- Richardson, V. 1998. Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 15 Maret tahun 2011.
- Rivai, V., dan A.P. Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Scott, W. 2009. *Financial Accounting Theory (Fifth Ed)*. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Sharma, S., R.M.Durand, and O.Gur-Arie. 1981. Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research* (pre-1986). No.18: 291.
- Santoso, S. 2011. *Mastering SPSS Versi 19*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tjondro, E. 2007. Pengaruh Level of Assurance, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Struktur Modal, dan Ukuran Bank Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra* vol Nopember.
- Van-Tendeloo, B., dan A Vanstraelen. 2005. Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from The Private Client Segment Market. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 15 Maret tahun 2011.
- Wijaya, K. 2010. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yeh, Yin-Hua., Pei-Gi Shu., dan Yu-Hui Su. 2010. Political Connection, Corporate Governance and Preferential Bank Loan. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Zheng, Y.N., dan Y Zhu. 2009. Bank Lending

